PENERAPAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAUDY INAYATI SUKMA

NIM. 210802119

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Maudy Inayati Sukma

NIM

: 210802119

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir: Lhoksukon, 29 Januari 2004

Alamat

: Lhoksukon, Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2025

Yang Menyatakan

NIM. 210802119

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MAUDY INAVATI SUKMA

NIM 210802119

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Dosen Pembimbing

جامعة الراترك

Dr. Sayed Amirulkamar, MM. M.Si

NIP.196110051982031007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG PENERAPAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Maudy Inavati Sukma

Nim. 210802119

Pada hari/Tanggal : Senin, 25 Agustustus 2025

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Educe

Dr. Said Amirul Kamar, M.M.,M.Si NIP.196110051982031007

Evi Yusnaini, S.AP

NIP.

Penguji II

Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si NIP. 197802032005041001

Dr. Taufik, S.Sos, M.Si

NIP. 198905182023211032

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr.Muji Mulia S.Ag. M.Ag. K NIP:197403271999031005

LIK INDONE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, serta efektivitas sistem pengawasan absensi dan mekanisme pemberian sanksi dalam mendukung kinerja organisasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta didukung oleh data sekunder berupa rekapan absensi selama tiga bulan pada tahun 2025. Informan penelitian meliputi analis kepegawaian dan pegawai BNNP Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedisiplinan di BNNP Aceh sudah mengacu pada regulasi nasional, termasuk penggunaan sistem absensi manual dan digital yang diterapkan secara berjenjang. Namun, masih ditemukan kendala berupa tingginya alasan keterlambatan, absen satu kali, bahkan gagal absen karena berbagai sebab di beberapa bagian organisasi, serta tantangan dalam penerapan sanksi disiplin secara konsisten. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penggunaan teknologi absensi dan penegakan disiplin yang lebih ketat untuk meningkatkan kinerja dan integritas pegawai, khususnya dalam konteks tugas strategis pemberantasan narkotika yang memiliki risiko tinggi. Dengan demikian, penerapan kedisiplinan yang efektif di BNNP Aceh menjadi fondasi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas dan pembangunan organisasi.

Kata Kunci: Kedisiplinan peg<mark>awai negeri si</mark>pil, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, absensi, sanksi disi<mark>plin, sistem pe</mark>ngawasan, pelayanan publik.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan Salam tidak lupa kita sanjung sajikan atas pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi dengan judul "PENERAPAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pintu surgaku ibunda tercinta Fakhriani A.Md. dan cinta pertamaku ayahanda tersayang Syibran Mulasri S.Pd. yang telah berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, dan mampu mendidik penulis, memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, memberikan motivasi dan dukungan terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Harapan yang selalu ada disetiap Doa yang penulis panjatkan "Semoga Allah menyertai dan memberkati bapak dan mama di dalam mengajari dan menuntun kami anak-anak yang telah Allah SWT titipkan".

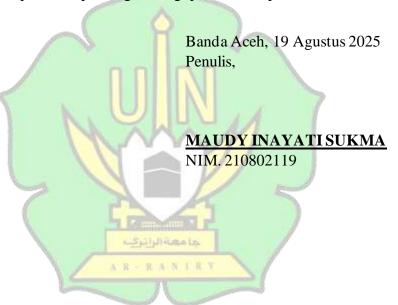
Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyakbanyaknya kepada:

- Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku Dosen Penasehat Akademik.
- 6. Dr. Sayed Amirulkamar, MM. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
- 8. Terima kasih kepada adik-adik tersayang Mahya Ridha, Maisura Arifa dan Maisuna Adzra atas doa dan dukungannya, yang telah membuat penulis termotivasi untuk terus bisa menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif* baik dalam bidang akademik maupun non-akademik serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

- 9. Terima kasih penulis ucapkan kepada bunda Fitri dan om Erwin yang senantiasa mendukung penulis pada masa sulit dan buntu dalam menjalankan skripsi ini.
- 10. Terimakasih untuk kebersamaan kita dan telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, menyenangkan serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya. Suka maupun duka telah dilalui bersama dalam proses pendewasaan diri sejak awal menduduki bangku SMP dan bangku perkuliahan. Penulis ucapkan terimakasih kepada Cut Raihanil Alya, Zikri Andri Pratama, Della Ariska Fitri, Ummayal Amni, Risti Fitria Mahbengi, Intan Zukhaira, Cut Meulu Novka Razira, Mirza Saputra, Haflizar, Mutia, dan Roza Tunnur.
- 11. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses meraih gelar sarjana.
- 12. Pihak-pihak yang lain yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik materiil maupun moril.
- 13. Terimakasih kepada diri sendiri Maudy Inayati Sukma, apresiasi sebesarbesarnya karena telah bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi anak perempuan pertama yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.A.P tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya.

Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dan rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.



DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH. Error! Bookm	ark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	
1.2. Identifikasi dan Rumusan Ma <mark>salah</mark>	
1.2.1. Identifikasi Masal <mark>ah</mark>	
1.2.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
Thereof And I feel I Theological Audio.	
1.4.2. Secara Praktis.	13
BAB IL	14
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Landasan Dan Konsep Teori	18
2.2.3. Konsep Kedisiplinan	20
2.2. Kerangka Berpikir	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian	25
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.4 Sumber Data dan Bentuk Data	27

3.4.1 Sumber Data Primer	27
3.4.2 Sumber Data Sekunder	27
3.5. Informan Penelitian	27
3.6.1. Teknik Wawancara	28
3.6.2. Observasi	29
3.6.3. Analisa Dokumentasi	29
3.7. Teknik Uji Keabsahan Data	30
3.7.1. Creadibility	30
3.7.2. Transfermability	31
3.7.3. Depndenbility	31
3.7.4. Confirmability	
3.8. Teknik Analisis Data	32
3.8.1. Pengumpulan Data	32
3.8.2. Reduksi Data	33
3.8.4. Penarikan Kesimpulan	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	35
4.2. Visi dan Misi	41
4.2.1. Visi	
4.2.2. Misi	41
4.3. Tujuan Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh	42
4.4. Hasil Penelitian	46
4.4.1. Penerapan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Narkotika Nasi Provinsi Aceh	
4.5. Pembahasan Penelitian	62
4.5.1 Penerapan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Narkotika Nasio Provinsi Aceh	
4.5.2. Faktor Pendukung Penerapan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Ba Narkotika Nasional Provinsi Aceh	
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDIP	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Absensi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BN	NNP) Aceh
Bulan Januari 2025	7
Tabel 1.2 Absensi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BN	NNP) Aceh
Bulan Februari 2025	8
Tabel 1.3 Absensi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BN	NNP) Aceh
Bulan Maret 2025	8
Tabel 2.1 Literatur Review	14
Tabel 3.2.1 Dimensi dan Indikator Peningkatan Disiplin	25
Tabel 3.2.2 Dimensi dan Indikator Faktor Pendukung	26
Tabel 3.5 Informan Penelitian	27
Tabel 4.1 Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Mengambil Cuti	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gedung Badan Narkotika Nasional (BNNP) Aceh	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNI	?) Aceł
	4.0
	4/



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara	73
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian	76
Lampiran 4 Surat Balasan Selesai Penelitian	77
Lampiran 5 Dokumentasi Lampiran	78



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Disiplin adalah kesadaran individu dan kepatuhan sukarela terhadap aturan organisasi dan norma sosial, yang mencerminkan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, sehingga mempromosikan kinerja yang efektif di antara Aparatur Sipil Negara tanpa paksaan.¹

Di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia untuk menjalankan prodak birokrasi pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan diperlukan tenaga-tenaga Aparatur Sipil Negara dalam rangka bingkai Negara Kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adanya penekanan disebutkan bahwa "Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara".

Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan netralitas, tanpa campur tangan politik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mengharuskan pembentukan kebijakan untuk menumbuhkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan dapat diandalkan untuk pelaksanaan pelayanan publik. Secara terstruktur pemerintahan berjenjang dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat desa, dalam

¹ Setia Ningsih, "Pengaruh Disiplin, Kompensasi dan Beban Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Mega Finance Cabang Pekanbaru," JOM Fekon 4, no. 1 (2017): 459-472

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

perjalanan waktu pemerintah menerapkan pembatasan-pembatasan Pegawai Negeri Sipil khususnya kedisiplinan yang berdasarkan pada berupa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil dengan keprofesionalan yang maksimal, serta bermoral sehingga mampu menjaga terpeliharanya ketertiban dan mobilisasi pada Pegawai Negeri Sipil.³

Pegawai Aparatur Sipil Negara memegang tanggung jawab yang signifikan untuk secara efektif mengelola operasi dan fungsi pemerintah sebagaimana digambarkan oleh tugas-tugas khusus yang diberikan kepada setiap forum dalam kerangka kelembagaan ini. Pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi utama ini oleh pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dan diartikulasikan dengan cermat melalui peraturan legislatif, yang berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut dengan mahir dan untuk mencegah potensi tumpang tindih atau kebingungan antara berbagai peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada individu atau departemen yang berbeda.

Keberhasilan atau kegagalan keseluruhan dari lembaga atau lembaga pemerintah tertentu sebagian besar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara, yang berfungsi sebagai tulang punggung operasi pemerintah, ini termasuk pertimbangan seperti kaliber pegawai Aparatur Sipil Negara, kompetensi mereka, dan keahlian mereka dalam memenuhi dan menyelesaikan tugas secara efektif. Selain itu, kemampuan

3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2

pegawai negeri ini untuk bekerja secara kolaboratif dan mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi sangat penting, karena secara langsung berdampak pada sejauh mana tujuan dan sasaran lembaga dapat dicapai, yang pada akhirnya memungkinkan realisasi maksimum misi dan visi lembaga.

Masalah disiplin bagi kalangan Aparatur Sipil Negara sudah ada diatur dengan jelas tentang kewajiban yang harus ditaati dan hak larangan yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat sistem manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berbasis merit.⁴

Salah satu unsur yang mendukung tercapainya tujuan dalam lembaga adalah disiplin yang merupakan cerminan tindakan kesadaran dan itikat baik yang didasarkan atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guna tercapainya pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kerja yang berhasil guna dan berdayaguna.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh merupakan lembaga penting dalam menjaga Aceh dari ancaman narkoba dan mempunyai peran penting untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, serta melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menanggulangi narkoba, penting untuk menerapkan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang

3

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

mencakup prinsip-prinsip integritas, transparansi, serta ketat dalam keselamatan dan kepatuhan melaksanakan tugas, sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang kode etik pegawai Badan Narkotika Nasional.⁵

Berbicara tentang disiplin kerja pegawai dalam meningkatkam prestasi kerja dalam mencapai visi misi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh sangat mengerti akan pentingnya disiplin kerja. Dalam hal tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menerapkan sistem absensi dengan finger print dan absensi dengan sistem manual, penetapan jam masuk dan jam keluar, penetapan jam istarahat, penepatan jadwal apel pagi serta pembina apel pagi, penetapan seragam kerja pegawai. Disiplin kerja pegawai yang baik dalam pelaksanaan kerja menunjukkan rasa tanggung jawab, solidaritas dan semangat kerja pegawai terhadap instansi maupun dirinya pribadi. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai dan tujuan dari organisasi pemerintahan dapat terwujud dengan maksimal. Edy Sutrisno menjelaskan bahwa, "Prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan pekerjaannya."6

Dalam penerapan disiplin kerja, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menerapkan jadwal masuk kantor mulai jam 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB dari hari Senin sampai hari Kamis. Berbeda dengan jadwal

⁵ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang kode etik pegawai Badan Narkotika Nasional.

⁶ Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), h. 151.

hari Jum'at, di hari ini pegawai di wajibkan masuk jam 08.00 WIB untuk mengikuti kegiatan senam bersama sebelum jam kantor dimulai sampai dengan selesai di jam 17.00 WIB. Namun, masih ada beberapa pegawai yang tidak mengkuti jadwal yang di tetapkan.

Penerapan sanksi sebagai bentuk mendsiplinkan pegawai bagi yang melanggar aturan juga sudah ditegaskan dalam Pasal 7 sampai Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional". Adapun pasal-pasal dimaksud sebagai berikut:

"Pasal 7, Mengatur pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang melanggar disiplin waktu kehadiran, seperti terlambat masuk atau pulang sebelum waktunya, serta ketidakhadiran dalam rekam hadir elektronik. Pasal 8, Mengatur bahwa pegawai yang menjalani hukuman disiplin akan mengalami pengurangan pembayaran tunjangan kinerja. Pasal 9, Merinci tingkat pemotongan tunjangan bagi pegawai yang mendapat hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat^{"7)}

Pasal-pasal ini menegaskan bagi pegawai yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka akan mendapatkan hukuman disiplin berupa pengurangan tunkin dengan tiga tingkatan yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh yang disiplin akan mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan 100% untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 90%

5

⁷ Pasal 7 sampai Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional

selama 1 bulan, untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau 85% selama 1 bulan, untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, tingkat sedang sebesar 80% selama 1 bulan, dan hukuman disiplin tingkat sedang dibayar 65% selama 2 bulan sedangkan tingkat disiplin berat sebesar 50% selama 3 bulan. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh harus terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penerapan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil agar menjadikan pegawainya menjadi pegawai yang berintegritas, professional, dan melayani masyarakat dengan baik. Hal ini sebagaimana Wulan menyebutkan bahwa "Sebagian besar pegawai memahami kedisiplinan dan prinsip-prinsip etika dasar setelah terlaksananya penerapan kedisiplinan". 9)

Penerapan secara keseluruhan termasuk penerapan kedisiplinan, sebagai responsif pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil dari setiap lini pemerintahan, sehingga secara teoritis kemampuan dapat ditingkatkan, dijabarkan dan kalabirasikan dengan sebuah tindakan operasional. Dipaparkan sebelumnya bahwa disiplin kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu intansi, organisasi ataupun perusahaan dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Jika disiplin kerja masih belum bisa diterapkan oleh pegawai dengan baik, maka prestasi kerja akan menurun. Hal ini akan berdampak pada penyelesaian kualitas dan kuantititas pekerjaan

_

⁸ https://bnn.go.id/ (di akses pada 03 September 2021)

⁹ Wulan, M., Rahayu, F., & Ciptaningrum, S. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kedisiplinan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Tahun 2016. Hal77-94.

¹⁰ Morans Makaduro, "Penerapan Disiplin dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Mapanget Kota Manado)," 2023.

pegawai. Jika tugas pekerjaan tidak mencapai hasil yang maksimal maka akan berdampak pada visi misi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Tingkat kehadiran pegawai juga masih menjadi permasalahan untuk menerapkan disiplin kerja yang baik. Alat absensi *Finger Print* yang terkadang mengalami masalah juga menjadi kendala bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk mendata pegawai yang hadir dan datang tepat waktu. Alat *Finger Print* yang terkadang mengalami masalah, membuat para pegawai semakin tidak disiplin, yaitu dengan menggunakan absensi manual sebagai pengganti dari absensi kehadiran dan keterlambatan mereka.

Hal ini akan menggangu aktivitas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, dalam menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak pada program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun Surat Perintah Tugas (SPT) dipakai sebagai bukti kehadiran bagi pegawai jika ada yang sedang melaksanakan dinas luar, sehingga tetap dianggap hadir meskipun tidak tercatat di fingerprint.

Berikut data absensi pegawai BNN Provinsi Aceh selama 3 (tiga) bulan di tahun 2025 berdasarkan rekapitulasi daftar hadir manual pegawai.

Tabel 1. 1 Absensi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Bulan Januari 2025

		Bulan Januari						
No	Bagian	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Hari Kerja	Absen	Sakit	Cuti	Jalan Dinas	Sebab Lain
1	Umum	19	16	-	4	6	4	4
2	Rehabilitas	19	7	-		3	3	3

3	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	19	10	1	2	5	3	5
4	Pemberantasan	19	31	2	-	4	23	3
Jumlah		64	2	6	18	33	15	

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2025

Tabel 1.2 Absensi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Bulan Februari 2025

		Jumlah			Bula	n Febr	uari	
No	Bagian	Hari Kerja	Jumlah Karyawan	Absen	Sakit	Cuti	Jalan Dinas	Sebab Lain
1	Umum	20	16	-	1	4	4	9
2	Rehabilitas	20	7	-		1	2	4
3	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	20	10	2	2	2	1	6
4	Pemberantasan	20	31	-	1	1	25	4
	Jumlah		64		4	8	32	23

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2025

Tabel 1.3 Absensi Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Bulan Maret 2025

		Jumlah	Jumlah Karyawan	Bulan Maret				
No	Bagian	Hari Kerja		Absen	Sakit	Cuti	Jalan Dinas	Sebab Lain
1	Umum	19	16	1	1	3	1	3
2	Rehabilitas	19	7		-	-	-	2
3	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat		10	-	1	4	-	7
4	Pemberantasan		31	1	1	1	22	4
	Jumlah		64	2	3	7	23	16

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2025

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah hari kerja dan distribusi kehadiran serta alasan ketidakhadiran pegawai pada masing-masing bagian kerja di BNNP Aceh selama bulan Januari. Total pegawai sebanyak 64 orang dibagi dalam empat bagian yakni Umum, Rehabilitasi, Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyarakat, serta Pemberantasan. Dari data terlihat tingkat absen dan cuti yang cukup tinggi terutama pada bagian Umum dan Pencegahan yang dapat memengaruhi efektivitas kerja keseluruhan. Jalan Dinas juga mencatat angka signifikan di bagian Pemberantasan yang menunjukkan tugas dinas luar ruangan yang intensif.

Pada tabel 1.2 bulan Februari menunjukkan penurunan jumlah ketidakhadiran karena sakit dan cuti dibandingkan Januari, namun alasan sebab lain (misalnya izin tertentu di luar cuti biasa) masih cukup tinggi terutama bagian Umum dan Pencegahan. Tingkat kehadiran pada bagian Pemberantasan tetap tinggi dengan sebagian besar pegawai berada dalam tugas jalan dinas. Dan jumlah pegawai masih sama, menunjukkan stabilitas jumlah personil dalam organisasi.

Sedangkan tabel 1.3 pada bulan Maret menunjukkan pengurangan keseluruhan ketidakhadiran, dengan cuti dan sakit lebih sedikit dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah yang hadir di tempat pekerjaan (tidak absen) meningkat secara signifikan khususnya di bagian Umum dan Pemberantasan. Sebab lain masih cukup tinggi terutama pada bagian Pencegahan dan Umum, mungkin akibat alasan terlambat, gagal absen atau bisa dengan alasan tugas kantor.

Berdasarkan data absensi tiga bulan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat beberapa pegawai yang secara konsisten disiplin dalam hal kehadiran dan ketepatan waktu. Sebagian besar pegawai mengalami ketidakhadiran yang cukup tinggi, disebabkan oleh cuti, sakit, dinas luar, serta

alasan lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan kedisiplinan kehadiran pegawai di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Adanya absensi karena sebab lain dan penggunaan surat perjalanan dinas sebagai pengganti absensi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi serta pemanfaatan teknologi absensi digital yang lebih efektif perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan disiplin pegawai secara menyeluruh.

Kehadiran pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau intansi pemerintahan, dengan kehadiran pegawai maka program kerja dapat terealisasikan dengan baik. Hal itu akan membuat pimpinan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh bertindak tegas dengan memberikan teguran kepada pegawai yang melanggar peraturan kerja peraturan yang telah ditetapkan serta mengingatkan kembali tugas-tugas pegawai pada apel pagi setiap hari senin dan rabu. Upaya ini bertujuan untuk peningkatan displin kerja untuk menjadikan pegawai memiliki prestasi kerja yang baik dengan melaksanakan tugas yang maksimal dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman untuk para pegawai.

Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi pemerintahan. Kedisiplinan yang baik mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi PNS secara maksimal serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, sangat membutuhkan penerapan kedisiplinan yang ketat agar tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal. Namun, masih terdapat beberapa pegawai yang tidak hadir tanpa alasan jelas, yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan program kerja. Oleh karena itu, upaya penerapan kedisiplinan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dari uraian diatas, sebagai dasar dan landasan untuk melakukan penelitian, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis pada judul "Penerapan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh". Kedisiplinan yang akan diteliti di batasi hanya di dimensi disiplin waktu.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti melakukan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya penerapan peningkatan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
- b. Terbatasnya faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian maka merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penerapan kedisiplinan dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan demi mendukung penerapan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.
- 1.3.2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menjadi penyaring menyeluruh bagi perumusan karya ilmiah pada tataran teoritis dan praktis. Sehingga, berikut uraian mengenai nilai penelitian:

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini agar dapat dimanfaatkan sekaligus memperdalam kajian Ilmu Adminitrasi Negara khususnya dalam penerapan kedisiplinan. Disisi lain diharapkan agar mampu memberikan informasi, data maupun fakta lapangan berkenaan dengan penerapan pegawai negeri sipil terhadap kedisiplinan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi salah satu referensi untuk pengembangan pola pikiran dan inovasi baru bagi mahasiswa terkhususnya jurusan Ilmu Adminitrasi Negara yang melakukan penelitian terhadap isu atau masalah yang lama. Bagi pegawai negeri sipil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penerapan kedisiplinan agar dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peninjauan dokumen untuk melengkapi penerapan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan juga menjadi tolak ukur keberhasilan operasional organisasi lembaga pemerintah di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas kedisiplinan pada lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.